



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMA RACHMAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **214735**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.733.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.057.100.000
2. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 913.050.000
3. Tanah Seluas 267 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 934.050.000
4. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 486.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/401 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 1.403.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 297.000.000

1. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



3. MOTOR, HONDA X1HO2N32I.1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 26.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ GK 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 265.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.975.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 411.731.411

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.522.406.411

III. HUTANG Rp. 53.727.568

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.468.678.843

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.